BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memberi keamanan dan perlindungan bagi masyarakat karena sebagai satu kesatuan sosial yang tak mampu berdiri sendiri, hukum merupakan satu-satunya sarana yang dapat menopang hidup manusia. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, berlaku bagi seluruh masyarakat sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. (Rahardjo, 2014, hlm. 64)

Hakikatnya hukum yang tumbuh di tubuh memberikan perlindungan dan batasan terhadap hak setiap individu atau biasa disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang disebut hak asasi manusia ialah serangkaian hak yang merupakan pemberian Tuhan yang terlekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangkan sedikit pun. Demi perlindungan kehormatan dan martabat manusia, negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warganya.

Dalam literatur ilmu hukum, membagi hukum pidana menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil yang dipahami sebagai kumpulan hukum yang memuat asas-asas, perbuatan yang diperintahkan, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran atau pengabaian dari hukum pidana. Serta hukum pidana formil, juga sering disebut hukum acara pidana, merupakan ketentuan yang bertujuan untuk menegakkan atau menerapkan hukum pidana materiil dan memuat asas-asas dan prosedur

sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan sampai penegakan keputusan pengadilan. Serangkaian peraturan pidana materiil diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun juga diatur dalam ketentuan lain. Bersamaan dengan itu yang mengatur hukum pidana formil adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun terdapat ketentuan hukum lainnya. (Eddy O.S. Hiariej, 2016, hlm. 18–19)

Hukum acara pidana berfungsi sebagai cara dan pendekatan penyidikan dan penanganan dugaan tindak pidana, hingga penegakan putusan terhadap tuntutan. Karena hukum acara pidana sangat berkaitan dengan adanya hukum pidana, maka hukum acara pidana mengatur bagaimana lembaga-lembaga negara yang diberi wewenang seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan beroperasi dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui penegakan hukum pidana menentukan tindakan apa yang harus diambil. (Wirjono Prodjodikoro, 1967, hlm. 13)

Instansi yang berwenang melakukan penyidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ialah kepolisian, kewenangan melakukan penuntutan berada pada penuntut umum, dan hakim berwenang mengambil keputusan dalam persidangan di pengadilan penyidikan. Walaupun kewenangan polisi, jaksa, dan hakim berbeda-beda, namun pada hakikatnya merupakan komponen yang tak terpisahkan.

Dalam hal aparat penegak hukum melakukan tugasnya untuk menegakkan hukum, terdapat adanya tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa tindakan tersebut memang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara proporsional sesuai ketentuan undang-undang dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum. Namun penegakan hukum di era HIR tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengawasan dan penilaian upaya paksa tersebut. Adapun mengenai perlakuan dan cara-cara upaya paksa yang dilakukan penyidik saat itu, semuanya lepas dari kewenangan pihak yang berwenang, dan tidak ada koresi sistematis yang diawasi atau dikendalikan. Oleh karena itu, hukum pidana memerlukan fungsi *check and balance* yang disebut praperadilan.

Dalam rangka proses penegakan hukum, praperadilan merupakan institusi baru yang hadir dalam sistem peradilan di Indonesia. Praperadilan bukanlah suatu badan peradilan yang berdiri sendiri. Pada dasarnya merupakan suatu sistem karena hukum acara pidana di Indonesia terdiri serangkaian proses yang tak terpisahkan. Tahapan proses peradilan pidana merupakan suatu rangkaian, dimana satu tahapan mempengaruhi tahapan lainnya. Rangkaian peradilan pidana di Indonesia melibatkan beberapa tindakan yaitu, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. (Jaholden, 2021, hlm. 1)

Pada era HIR, peraturannya dibentuk oleh pengaturan kekuasaan kolonial Belanda, sehingga tidak ada pemantauan atau evaluasi terhadap tindakan upaya paksa yang dapat menjamin HAM. Sehingga atas dasar tersebut menjadi dorongan lahirnya lembaga praperadilan. Tujuan lembaga praperadilan pada dasarnya adalah untuk mengawasi secara horizontal segala tindakan paksa

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan perkara pidana, dan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak benar-benar melanggar peraturan atau undang-undang. Keberadaan praperadilan bukanlah membentuk suatu badan peradilan yang independent. KUHAP hanya memberikan wewenang dan fungsi baru kepada semua pengadilan setempat yang ada. (Harahap, 2003, hlm. 37)

Sidang praperadilan mencerminkan *Rechter Commisaris* di Belanda yaitu pemberian wewenang kepada hakim yang bertanggung jawab atas pemeriksaan pendahuluan yang menunjukkan peran aktif hakim, sedangkan di Eropa Tengah "*Rechter Commisaris*" adalah lembaga yang berwenang menangani tindakan paksa (*dwang middelen*), penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan badan dan penggeledahan rumah serta pemeriksaan dokumen. (Oemar Seno Adji, 1980, hlm. 88)

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dasar terciptanya praperadilan adalah sebagai berikut: (Harahap, 2003, hlm. 64)

Mengingat perlu adanya pengurangan hak asasi para tersangka dalam penyidikan perkara, namun hal tersebut harus tetap berpedoman pada ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga yang disebut Badan Penyidikan Praperadilan untuk memantau perlindungan HAM tersangka atau terdakwa.

Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. (Ilyas, 2024)

Ketentuan mengenai praperadilan tercantum dalam pasal 1 angka 10 KUHAP juga dipertegas dalam ketentuan lain, yaitu Pasal 77 KUHAP, Pengadilan tingkat pertama memiliki wewenang untuk memeriksa dan menentukan keabsahan suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, berdasarkan Undang-undang tersebut. Serta kompensasi dan/atau rehabilitasi jika perkara pidananya diputus dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Keterbatasan wewenang lembaga praperadilan mengakibatkan beberapa tindakan paksa yang tidak disebutkan dalam UU, seperti penetapan tersangka tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan.

Penetapan tersangka termasuk suatu tindakan paksa yang dilakukan penyidik ketika proses penyidikan berlangsung. Asas kehati-hatian dalam perkara pidana lebih diutamakan serta asas *due process of law* guna mencegah kesalahan atau penyelewengan terhadap wewenang aparat kepolisian. Bagaimana jikalau seorang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun atas penetapannya tersebut belum terbukti atau belum memiliki bukti asli yang cukup berdasarkan KUHAP.

Ketentuan mengenai lembaga praperadilan dalam KUHAP sempat mengalami uji materil, yakni dalam Pemohon Bachtiar Abdul Fatah (penggugat) meminta MK menguji ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP dimana ketentuan tersebut tidak sejalan dengan UUD 1945 yang meminta kepada MK supaya dapat melakukan penafsiran dalam hal penetapan tersangka agar menjadi objek praperadilan. Sebab penetapan tersangka yang dilakukan

kepadanya belum memenuhi bukti permulaan yang cukup seperti ditentukan dalam KUHAP. (Jaholden, 2021, hlm. 46)

Berdasarkan isi putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yang dilakukan uji materil terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945, bahwa penetapan tersangka ditetapkan sebagai objek baru dalam lembaga praperadilan. Hal tersebut disebabkan karena sebenarnya objek praperadilan semula tidak dapat melintasi hak asasi tersangka yang menyebabkan pelanggaran HAM, sehingga hal tersebut berlawanan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Mengingat penetapan tersangka merupakan salah satu rangkaian penyidikan yang menimbulkan dirampasnya hak asasi manusia, maka sudah seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik menjadi hal yang dapat diminta secara sah di lembaga praperadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang dari kesewenang-wenangan penyidik yang mungkin saja terjadi, sekalipun dalam prosesnya terdapat kesalahan dapat diperiksa dan diputus tidak lain dan tidak bukan hanya melalui pranata praperadilan.

Berkenaan dengan proses penetapan tersangka tidak dipungkiri akan adanya beberapa tindakan penyidik yang tidak berkesesuaian dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada cideranya hak tersangka. Tentu hak-hak tersangka harus diperjuangkan agar dapat mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meskipun telah menyangang status tersangka namun tetap pada diri tersangka masih melekat hak asasi manusia yang harus dilindungi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan (*abuse of power*) seperti salah satu kasus yang sedang ramai diperdebatkan yaitu kasus praperadilan Pegi Setiawan. Dalam perjalanannya seorang tersangka yang dalam penetapan status tersangkanya terdapat pelanggaran ketentuan hukum acara pidana di indonesia yang mengakibatkan dilanggarnya hak asasi tersangka. Maka berdasarkan latar belakang tersebut serta dengan beberapa penelitian yang terdahulu seperti karya yang berjudul Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka karya Adawiyah. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada acuannya yakni ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Maka penulis tertarik untuk mengkaji suatu penelitian dalam skripsi yang penulis buat dengan judul, **“PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 21/PUU-XII/2014 MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat masalah-masalah dalam penelitian ini yang dapat dirumuskan dan diteliti penyelesaiannya secara ilmiah. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka kaitannya dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap proses penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana lembaga praperadilan seharusnya menjadi instrumen untuk menguji sah tidaknya penetapan seorang tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang diteliti dalam penulisan ini, penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perluasan objek praperadilan mengenai keabsahan penetapan tersangka kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 terhadap proses penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa lembaga praperadilan seharusnya menjadi instrumen untuk menguji sah tidaknya penetapan seorang tersangka.

D. Kegunaan Penelitian

Nilai penelitian ditentukan oleh besarnya keuntungan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, pemilihan masalah dalam penelitian ini dijadikan

suatu alasan seberapa besar manfaat dalam penelitian ini. Berikut adalah manfaat yang di harapkan penulis dalam penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terletak pada hubungannya dengan perkembangan ilmu hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan berguna dalam berkembangnya ilmu hukum acara pidana mengenai praperadilan sebagai lembaga yang dapat melindungi hak tersangka.
- b. Diharapkan hasil penelitian akan berguna untuk mengembangkan rujukan dan kepustakaan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai perlindungan hak tersangka melalui pranata praperadilan.

2. Manfaat Praktis

Dalam penulisan ini manfaat praktis ialah berkaitan dengan penyelesaian permasalahan, yakni:

- a. Hasilnya diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih terstruktur sehingga penyidik kepolisian dapat bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang.
- b. Bagi praktisi hukum hasilnya diharapkan dapat memperluas wawasan dalam hal melakukan pendampingan.
- c. Bagi hakim pengadilan diharapkan dapat membantu hakim dalam menangani perkara praperadilan yang serupa agar lebih konsisten berdasarkan hukum yang berlaku guna meminimalisir perbedaan interpretasi yang dapat mempenaruhi keadilan.

- d. Diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses praperadilan supaya terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang memiliki konsep negara hukum. Hal ini berdasar kepada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen Ke-4. Pasal tersebut menyebutkan negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat, termasuk perlindungan jiwa termasuk didalamnya jaminan HAM atau Hak Asasi Manusia.

Alinea Keempat Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 berisi mengenai pemaknaan tujuan negara sesuai dengan amanat konstitusi. Makna yang tersurat didalam alinea keempat Preambule Undang-Undang Dasar 1945 juga dikemukakan oleh Anthon F. Susanto dan H.R. Otje Salman, yang mengungkapkan bahwa alinea keempat ini menjabarkan terkait sila-sila Pancasila. Yang mana Pancasila memiliki nilai yang murni dan luhur. Luhur sebab isi dari Pancasila terkait dengan aspek keagamaan, ekonomi, pertahanan, sosial budaya yang bercorak partikular. Kemudian luhur sebab mengandung nilai turun-temurun. (H.R. Otje Salman & Anton F. Susanto, 2008, hlm. 158)

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai kewajiban untuk senantiasa menjamin bahwa seluruh warga negaranya diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintah serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Sebagai negara yang menganut konsep negara hukum, di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai tata kehidupan bermasyarakat sebagai warga negara, tetapi juga segala aspek keberlangsungan negara harus senantiasa berlandaskan hukum, seperti halnya sistem pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, bahwa pada intinya menjelaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain berdasarkan hukum pidana sebelumnya.

Konsekuensi dari diterapkannya asas legalitas adalah sebagai jaminan untuk perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai sesuatu yang tidak bisa diabaikan, dikurangkan atau bahkan dirampas oleh siapa pun.

Dalam hukum pidana materiil asas legalitas merupakan asas yang begitu fundamental. Asas ini diartikan sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain berdasarkan hukum pidana sebelumnya). Definisi ini juga mencakup tentang:

1. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang);
2. *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan/tindak pidana), dan
3. *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan/tindak pidana tanpa pidana menurut undang-undang).

Kemudian daripada itu, asas legalitas selanjutnya bisa diartikan mengandung beberapa limitasi yaitu: tidak bersifat retroaktif (berlaku surut), peraturan pidana hendaklah diformalkan kedalam bentuk aturan tertulis (*lex*

scripta); diinterpretasikan dengan jelas (*lex certa*) kemudian haruslah ditafsirkan dengan ketat, serta didalamnya tidak diperkenankan untuk melakukan penafsiran analogi (*lex stricta*). (Remmelink, 2003, hlm. 355)

Dengan begitu warga negara dapat terlindungi dari potensi penyelewengan otoritas negara. Pihak berwenang tidak bisa menjadikan suatu tindakan termasuk kejahatan dan kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap warga negara karena melanggar perintah otoritas yang mengatur. Kebebasan warga negara untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu hanya dapat dibatasi dengan cara tertentu yaitu, dalam penyusunan ketentuan undang-undang yang dirancang dengan melibatkan seluruh elemen warga negara serta harus termuat ketentuan hukum pidana yang disusun secara jelas. Proses demokrasi ini juga harus dilakukan secara terbuka (transparan) dan penuh tanggung jawab (*responsibility*). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat (yang kepentingannya diwakili oleh badan legislatif) memahami dan memahami mengapa tindakan tertentu dinyatakan dilarang dan pelanggaran dapat dihukum pidana.

Dalam melaksanakan penegakan ketika terjadi suatu pelanggaran hukum, tentunya penegak hukum harus berlandaskan hukum yang berlaku. Hukum acara pidana memuat ketentuan tentang bagaimana seseorang yang diduga melakukan tindak pidana diperiksa, diselidiki, diadili, dan dihukum berdasarkan cara-cara yang berlaku.

Penegakan dalam hukum pidana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHP melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, dari Syafridatati, menjelaskan aparaturnegara yang berwenang dalam sistem peradilan pidana adalah aparat polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang berwenang menegakkan ketentuan undang-undang yang ada. Dengan demikian, institusi polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan adalah satu kesatuan yang utuh dan tak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum. (Syafridatati dkk., 2022, hlm. 5)

Dalam praktek penegakan hukum pidana dilakukan melalui serangkaian proses hukum yang dimulai dari tahap pertama yaitu penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan yang dilaksanakan oleh instansi kepolisian, kemudian tuntutan yang dilaksanakan oleh penuntut umum, dan tahapan persidangan yang dipimpin oleh hakim. (Sirande Palayukan, 2013, hlm. 6) Dalam proses persidangan, hakim bertanggung jawab atas penerapan hukum, sebab diibaratkan selayaknya orang yang memahami nilai hukum yang ada di masyarakat. (Otje Salman & Anton F. Susanto, 2009, hlm. 15) Selain itu, hakim bertugas mengambil keputusan yang dapat memberikan keadilan dan bebas dari pengaruh apapun.

Tahapan awal dalam proses penegakkan hukum pidana yaitu mulai dari tahap penyelidikan dimana menurut KUHAP penyelidikan berarti segala upaya guna menggali dan mendapati perbuatan yang dipersangkakan merupakan perbuatan pidana. Lalu diikuti dengan tahap penyidikan guna menggali dan memperoleh bukti-bukti yang bertujuan agar perbuatan pidana yang ditemukan dalam tahap penyelidikan menjadi terang sehingga dapat menentukan

pelakunya. Diantara penyelidikan dan penyidikan keduanya saling melengkapi dan berkaitan supaya dapat menyelesaikan suatu pemeriksaan tindak pidana yang dilaksanakan oleh instansi kepolisian.

Penegakkan hukum dilaksanakan oleh petugas yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan upaya paksa kepada setiap orang yang dianggap bersalah yang disangkakan kepadanya melakukan perbuatan pidana seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka. Akan tetapi dapat menjadi suatu masalah jika dalam pelaksanaannya wewenang tersebut disalahgunakan sehingga akan melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya terbentuklah sebuah lembaga peradilan yang disebut dengan praperadilan dimana lembaga tersebut adalah elemen dari pengadilan negeri yang melaksanakan tugas pengawasan terkhusus ketika terdapat upaya paksa yang dilakukan kepada tersangka baik oleh penyidik ataupun jaksa penuntut umum. Maksud dari fungsi pengawasan ialah mengawasi penegak hukum dalam menjalankan wewenang yang dimilikinya berdasarkan ketentuan undang-undang, sehingga ketika melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang. (Yahya Harahap, 2002, hlm. 3)

Berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memberikan perluasan ruang lingkup praperadilan, yang semula diatur di Pasal 77 KUHAP, pengadilan negeri memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan memutus berdasarkan aturan yang berlaku terkait keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, dan sahnya ganti rugi dan/atau rehabilitasi dalam perkara pidana yang ditangguhkan di

tahap penyidikan atau penuntutan. Setelah diputuskan dalam putusan MK, sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah objek praperadilan yang telah mengalami perluasan.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, seringkali terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mencederai hak asasi tersangka sehingga hal tersebut dapat diupayakan melalui pranata praperadilan agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan.

Keadilan akan tercapai jika dalam prosesnya dibangun dengan berdasar kepada cita hukum (*rechtidee*) didalam negara hukum (*rechtsstaat*), tidak berpedoman kepada negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum yang berlaku bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat, dengan demikian penegakkan hukum harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada empat unsur yaitu: (Ishaq, 2009, hlm. 43)

1. Keadilan hukum (*gerechtigheit*),
2. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*),
3. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan
4. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*).

Kepastian tak dapat dipisahkan dari hukum, utamanya dalam aturan hukum tertulis. Ketiadaan nilai kepastian maka hukum dapat menyebabkan hilangnya makna sebab sudah tak dapat digunakan sebagai acuan dalam berperilaku untuk setiap orang. Sehingga kepastian hukum menjadi salah satu tujuan hukum.

Beberapa pengertian terkait kepastian hukum yakni terdapat kejelasan, tidak mempunyai banyak pemaknaan, non-kontradiktif, serta bisa dilaksanakan. Hukum perlu memiliki keterbukaan sehingga setiap orang dapat mengerti dan paham akan makna suatu aturan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum dapat menjadi salah satu perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan hak dan kewajiban semua orang serasi dengan kebudayaan masyarakat yang berlaku.

Lembaga praperadilan memiliki peran untuk memberi jaminan dan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dalam hal penyidik maupun penuntut umum bertindak sewenang-wenang dimana hal tersebut tak sesuai dengan ketentuan hukum pada saat melaksanakan upaya paksa demi keperluan penyidikan & penuntutan. Lembaga praperadilan berperan untuk menegakkan hukum yang berlaku guna memberikan perlindungan hak kepada tersangka. Perbedaan antara fungsi dan peran praperadilan tidak terlalu jauh. Apabila fungsi dari lembaga praperadilan ialah sebagai pengawasan terhadap penegak hukum pada saat melaksanakan penegakkan hukum, sedangkan peran praperadilan ialah guna memberi lindungan hak-hak tersangka /terdakwa.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif-Analitis artinya bertujuan untuk memberi gambaran serta analisis terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan aturan hukum

yang berlaku. Dengan demikian hal tersebut bertujuan agar dapat dilukiskan terkait realitas dari keadaan objek atau masalahnya, supaya bisa melakukan penelaahan guna pengambilan kesimpulan yang sifatnya umum. Deskriptif artinya penelitian ini dilaksanakan dengan menggambarkan objek penelitian yang didasarkan pada ketentuan undang-undang serta tujuannya untuk memberi gambaran sesuatu objek yang menjadi permasalahan didalam penelitian. (Ashofa Burhan, 2000, hlm. 19)

Dalam penelitian ini digambarkan mengenai lembaga praperadilan sebagai lembaga yang dapat memberikan perlindungan bagi hak tersangka yang dianalisis dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka dan dengan peraturan lain yang berlaku yaitu KUHAP.

2. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang biasanya dilakukan dengan mengarahkan fokus penelitian pada literatur yang ada melalui penggunaan analisis bahan-bahan pustaka ataupun data sekunder semata. Disusun dengan menerapkan cara berpikir dimana penarikan kesimpulannya didapat dari suatu yang sifatnya umum yang kebenarannya dapat dibuktikan serta kesimpulannya diarahkan untuk suatu hal yang sifatnya khusus. (Bambang Sunggono, 2003, hlm. 27)

Oleh karena itu, objek yang akan diteliti dilakukan melalui Pendekatan kualitatif yaitu cara-cara penelitian dimana fokus utamanya ada pada interpretasi norma yang terkandung dalam ketentuan undang-undang.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan diantaranya sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library Research dilaksanakan dengan menggunakan data-data sekunder. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh data sekunder yang bisa menyediakan materi yang diperlukan didalam penulisan. Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni:

- a) melakukan penelurusan bahan hukum meliputi:
 - Bahan hukum utama/primer ialah sumber hukum yang mencakup UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP, KUHAP, dan Putusan MK No. 21 / PUU-XII / 2014.
 - Bahan hukum sekunder ialah materi referensi yang digunakan untuk memberikan penggambaran atau analisis terhadap bahan-bahan hukum utama. Ini termasuk buku, jurnal, serta artikel.
 - Bahan hukum tersier ialah sumber informasi yang dapat memberi tambahan pengetahuan daripada kedua bahan hukum diatas. Ini mencakup bahan ajar dan referensi dari situs internet.
- b) Mengklasifikasikan bahan hukum, yakni sumber hukum yang dipakai sebagai alat analisis dalam penulisan hukum ini akan berpusat pada KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka.

- c) Mengqualifikasikan bahan hukum, yaitu mempertajam fokus penelitian yakni dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan Pasal 77 KUHAP mengenai praperadilan ditinjau dengan isi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka.

b. Penelitian Lapangan

Tujuan dari penelitian lapangan dilaksanakan guna mengumpulkan bahan primer yang akan melengkapi dan menunjang data sekunder. Data primer ini didapat melalui interaksi langsung dengan pihak terkait, sesuai dengan fokus dan topik penelitian, melalui proses tanya jawab.

Penelitian lapangan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yakni:

- a) Menentukan responden/narasumber yang akan ditujukan kepada instansi mana dan kepada siapa.
- b) Menyusun daftar pertanyaan terkait dengan topik permasalahan yang diteliti.
- c) Menentukan tempat dan waktu untuk melakukan penelitian lapangan.
- d) Melakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, suatu proses analisis terhadap isu-isu yang muncul dalam penelitian, dengan mengadopsi

pendekatan asas hukum dan berpedoman kepada norma hukum yang terkandung dalam ketentuan undang-undang yang berlaku, serta memakai data sekunder berupa bahan pustaka.

Bahan kepustakaan yang dipergunakan adalah terikat pada dua bahan yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan primer diantara sebagai berikut: KUHP, KUHP, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan peraturan lain yang berkaitan. Kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari buku, teori-teori hukum, jurnal hukum, doktrin hukum serta karya penelitian hukum. Sedangkan bahan tertier seperti Kamus Bahasa Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU), kamus hukum dan Ensiklopedi hukum ataupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

Lebih lanjut dalam penelitian inipun dilakukan studi lapangan melalui proses wawancara atau tanya jawab bersama institusi terkait dengan topik masalah yang akan dilakukan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Instrumen pengumpulan data yang dipakai ialah studi kepustakaan atau studi kepustakaan (*documentary study*), yang digunakan guna menghimpun data sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah buku hukum, jurnal hukum, laporan penelitian, serta dokumen ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat.

Selain itu juga dilakukan penelitian lapangan yang kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan *log book* mengenai catatan tulisan hasil penelitian.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data untuk penelitian kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan analisis kualitatif, penelitian ini akan melibatkan pengamatan terhadap data yang didapat, serta mengaitkan semua data tersebut dengan aturan dan asas hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti, menggunakan logika induktif, (Bambang Waluyo, 1996, hal. 76) dalam hal ini, pendekatan logika induktif akan berorientasi dari yang spesifik ke yang lebih umum, dengan memanfaatkan alat interpretasi dan konstruksi hukum untuk menganalisis data. Kemudian, data tersebut dianalisis memakai metode kualitatif, yang dapat memungkinkan untuk menyimpulkan dengan pendekatan deduktif, yang dihasilkan kesimpulan umum dari permasalahan dan tujuan penelitian. (Moeloeng, 2002, hlm. 103)

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 18 Kota Bandung;

b. Instansi

- Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jl. Merdeka No.18-21,
Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat 40117